

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anggaran digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (public welfare) dengan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan (Bastian,2010:192). Sebagaimana Undang-Undang tentang keuangan negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disusun sesuai kebutuhan pemerintah negara akan tetapi pelaksanaan tata kelola pemerintah masih ditemukan masalah lambatnya penyerapan anggaran dana APBN oleh Kementerian atau Lembaga dan satuan kerja (Satker) dibawahnya. Penyerapan anggaran yang baik dapat dilihat daritingkat pelaksanaan realisasi fisik dan realisasi anggaran yang terjadwal sesuai dengan rencana kerja selama satu periode tahun anggaran (Oktaliza et al., 2020). Namun hampir semua daerah di Indonesia mengalami tingkat penyerapan anggaran yang rendah, dan fenomena ini terus hingga saat ini terjadi setiap tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani (2020) kembali menyoroti kinerjaserapan anggaran pemerintah daerah yang lambat. Dari total belanja APBD yang sebesar Rp 1.080,7 triliun, hingga akhir tahun oktober baru terealisasi Rp 678 triliun. Sehingga masih ada lebih dari Rp 400 triliun sendiri yang akan dieksekusi pada bulan November dan Desember.

Gambaran umum tentang APBD Kabupaten Alor Pendapatan Asli Daerah target PAD pada TA 2020 sebesar Rp 60,9 miliar lebih atau meningkat 1,92% dari APBD TA 2019 Sebesar Rp 57,77 Miliar lebih sumber-sumber pendapatan PAD yang mengalami peningkatan yakni retribusi daerah yang meningkat sebesar 15,85% dan pajak daerah sebesar 10,19% sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah berkurang yang disesuaikan dengan analisa besaran potensi dan besaran realisasi yang di terima. Dana perimbangan target pendapatan dari dana perimbangan pada APBD TA 2020 sebesar Rp.903,31 miliar lebih atau bertambah sejumlah Rp.39,65% miliar lebih atau meningkat 4,58% dari target perimbangan TA 2019 meningkat dana perimbangan akibat bertambah dana alokasi khusus (DAK) Alokasi dana pendapatan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD TA.

Struktur belanja daerah kebijakan terhadap belanja daerah pada APBD TA 2020 dijadikan untuk memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tidak terduga sedangkan kebutuhan belanja langsung merujuk pada RKPD tahun 2019 yang diarahkan untuk merespon kebutuhan pembangunan yang secara riil berkembang di masyarakat juga dan untuk mendukung program dan kegiatan yang telah diarahkan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat secara umum belanja daerah pada APBD TA 2020 dialokasikan sebesar Rp.1,172% triliun lebih atau berkurang 0,17% dan

belanja TA 2019 sebesar Rp.1,174 Triliun. Selain itu alokasi belanja langsung diarahkan untuk pelaksana kegiatan yang bersumber dari DAK fisik maupun non fisik rincian alokasinya sebagai terdapat dalam PPAS 2020.

Dari permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan daya serap anggaran pendapatan belanja daerah pada kabupaten Alor.. Menurut (Rahmawati&Ishak, 2020) faktor yang mempengaruhi serap ananggaran belanja daerah yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa. Menurut (Gagola et al., 2017) faktor yang mempengaruhi serapan anggaran belanja daerah adalah perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 Menyebutkan bahwa penyerapan anggaran Merupakan salah satu indikator Evaluasi kinerja atas aspek implementasi penyerapan anggran juga merupakan salah satu unsur akuntabilitas keuangan pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kegagalan target penyerapan anggran berakibat hilangnya manfaat belanja karena dana yang di alokasikan ternyata tidak semua dapat di manfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang mengangur (BPKP,2011). Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelola keuangan yang harus di laksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai pelaksanaan merupakan aktivitas usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah di rumusan dan di tetapkan oleh (BPKP 2011).

penelitian yang dilakukan oleh Jumriani (2018) menyatakan bahwa jika kualitas Sumber Daya Manusia semakin baik maka penyerapan anggaran semakin meningkat. Sejalan dengan penelitian Ani et al (2019) bahwa kualitas Sumber Daya Manusia yang baik mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Sedangkan penelitian Ramadhani & Setiawan (2019) mengatakan dalam pengujian hipotesis bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Faktor lain yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran adalah perencanaan anggaran yaitu proses penting dalam penyusunan strategi yang akan dilaksanakan secara bertahap dan disertai dengan anggaran untuk mencapai tujuan dimasa depan. Oktaliza et al (2020) menjelaskan bahwa faktor perencanaan anggaran memberikan pengaruh signifikan terhadap proses penyerapan anggaran. Didukung oleh penelitian Rahmawati& Ishak (2020) mengatakan penyerapan anggaran dipengaruhi 84,8% oleh faktor perencanaan anggaran, semakin baik kualitas sumber daya manusia maka tingkat penyerapan anggaran akan semakin tinggi. Faktor yang mempengaruhi proses penyerapan anggaran ialah pengadaan barang dan jasa, yaitu proses memenuhi kebutuhan untuk menjalankan program pembangunan pemerintah. Tofani et al (2020) menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan penelitian Pulualla (2021) mengatakan pengadaan barang dan jasa tidak mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

Untuk mencapai suatu kegiatan, semakin optimal penyerapan anggaran maka akan semakin banyak fasilitas umum dan pelayanan publik yang dapat dinikmati masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih berkonsentrasi pada kegiatan yang lebih produktif untuk menghindari pengangguran uang daerah. Dalam hal ini, peneliti menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran, antara lain perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, administrasi, dan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Alor.”**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas, persoalan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran?
2. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran?
3. Apakah pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran?
4. Apakah kompetensi SDM berpengaruh terhadap penyerapan anggaran?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pencatatan Administrasi terhadap penyerapan anggaran.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran.

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan masukan bagi lembaga dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan daya serap anggaran (APBD) Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Alor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk memperdalam pengetahuan terkait Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (APBD) pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Alor.

b. Bagi instansi / perusahaan

Diharapkan Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan kepada lembaga tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (APBD) pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Alor.